

Para ASN Ancam

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

bil kebijakan saya berpen- dapat pejabat tersebut sudah berlaku zolim kepada seluruh ASN. Karena itu adalah bagian dari hak. Dan sebagai konsekuensinya bila TPP13 dijadikan sebagai ajang politik, maka secara pribadi saya tidak akan berperan serta dalam menentukan pilihan dalam pilkada alias golput," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.

Penerapan TPP di instansi pemerintah diharapkan berdampak pada profesionalisme dalam pelayanan publik seiring peningkatan penghasilan pegawai dibandingkan dengan sistem honorarium yang diterapkan sebelumnya.

Walaupun masih ada level jabatan pada instansi tertentu yang justru penghasi-

lannya menurun atau lebih tinggi dengan sistem honorarium.

Besaran nilai TPP bagi ASN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pembayarannya berdasarkan penilaian kinerja dan kedisiplinan. Tidak ada lagi pegawai yang malas atau biasa-biasa saja lebih tinggi penghasilannya dibanding yang rajin. Tidak ada lagi pegawai yang kerjanya tidak memenuhi target memiliki penghasilan yang sama dengan yang memenuhi target.

Persentase penilaiannya sudah diatur, dimana kinerja merupakan aspek penilaian dengan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan disiplin pegawai. Jadi ketika ASN rajin ke kantor dalam artian tidak terlambat, itu juga tidak menjamin penghasilan akan lebih tinggi jika dikantor tidak mampu menyelesaikan tugas yang sudah dijabarkan oleh atasan.

Namun bagi ASN dengan tingkat kedisiplinan yang buruk seperti datang tidak tepat waktu tapi pekerjaan yang dilakukan mencapai

target, maka ASN tersebut pun akan menerima penghasilan yang lebih tinggi. Tapi yang pasti akan jauh lebih tinggi lagi kalau kedua aspek penilaian tersebut maksimal.

Lalu bagaimana jika ada indikasi politisasi dari pencairan TPP ini?

Kordinator Karawang Monitoring Group (KMG) Imron Rosadi menegaskan, sesuai aturannya, TPP ASN seharusnya sudah bisa untuk dicairkan. Bahkan, lanjut dia, sekalipun Pemkab Karawang memberlakukan one day one home, di tengah wabah coronavirus, namun tidak akan mereduksi hak mereka.

Menurut Imron, pihaknya tidak begitu memahami kenapa sampai detik ini, hak para ASN tersebut tak kunjung diterima. Namun Imron melihat ada indikasi penundaan pencairan TPP berkenaan dengan tahun politik.

"Barangkali ada kekhawatiran kalau TPP 13 dicairkan, dan kalangan guru tidak mendapatkan, ada arus dukungan yang berubah. Tapi ini kan masalah, apalagi berbicara hak ASN," tandasnya. (red)